

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MANADO

Nonce Y. Manggong¹, Vecky A.J. Masinambow², Ita Pingkan F. Rorong³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

E-mail: noncemanggong06@gmail.com, veckymasinambow@yahoo.com, itapingkan@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap kemiskinan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan Eviens 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya apabila pendapatan asli daerah bertambah atau mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang atau turun begitu pula sebaliknya cateris paribus. Sedangkan untuk dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya apabila dana alokasi khusus bertambah atau mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang atau turun begitu pula sebaliknya cateris paribus. Hasil yang lain menunjukkan dana alokasi umum dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Tingkat Kemiskinan

ABSTRACT

The purpose of this study was to see how the influence of regional original income, general allocation funds, special allocation funds and profit sharing funds on poverty. The analytical tool used is multiple regression analysis with the help of Eviens 8. Results of the study showed that regional original income had a negative and significant effect on poverty. The results of the study show that general allocation funds have no effect on poverty. The results of the study show that regional original income has a negative and significant effect on poverty. This means that if local revenue increases or increases, poverty will decrease or decrease and vice versa cateris paribus. Meanwhile, special allocation funds have a positive and significant effect on poverty. This means that if the special allocation fund increases or increases, poverty will decrease or decrease and vice versa cateris paribus. Other results show that general allocation funds and profit-sharing funds have no effect on poverty.

Keywords: Fiscal Decentralization, Poverty Level

1. PENDAHULUAN

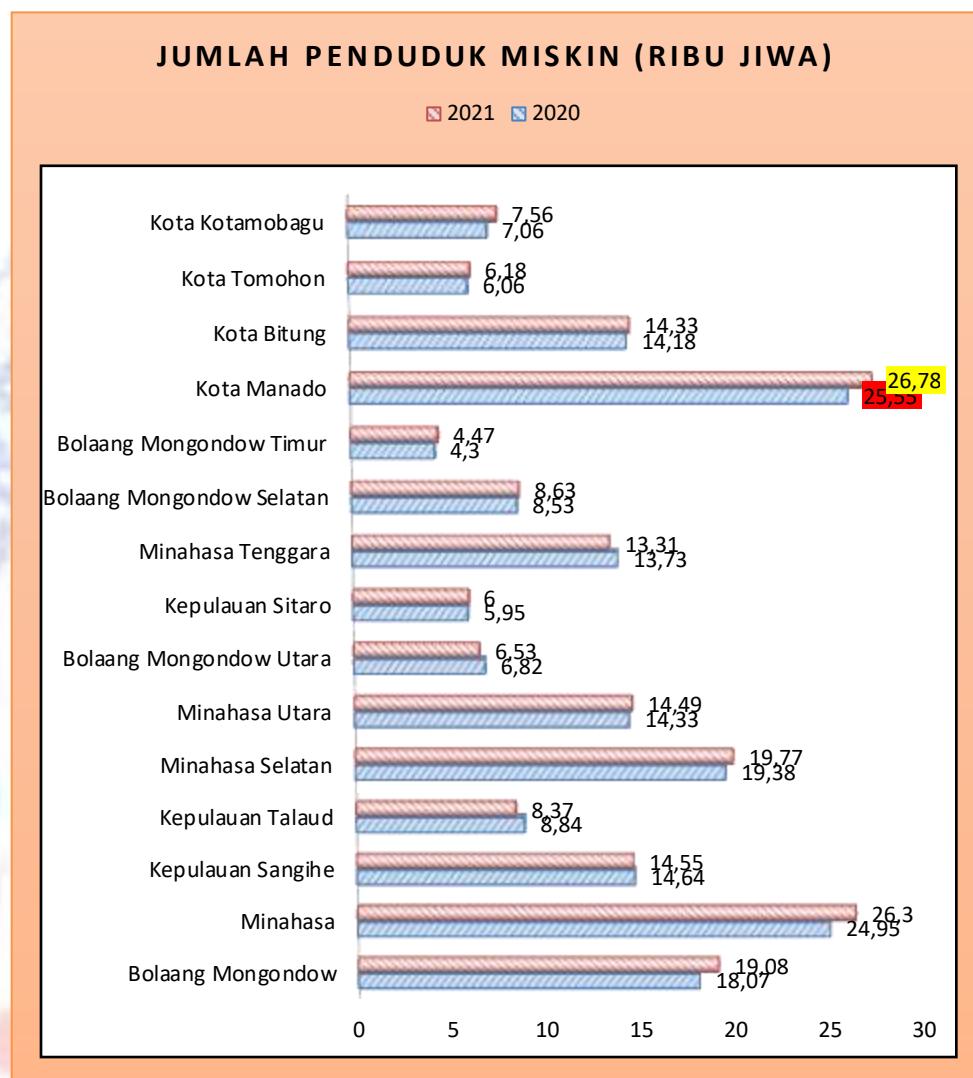
Latar belakang

Peranan pemerintah dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan langsung atau tidak langsung salah satu bentuk peranan pemerintah secara langsung adalah dengan intervensi anggaran melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan kebijakan perpajakan, kebijakan bukan pajak, kebijakan anggaran belanja negara maupun kebijakan pembiayaan anggaran termasuk transfer. Sedangkan peran pemerintah secara tidak langsung dapat di tempuh melalui berbagai regulasi atau peraturan pemerintah.

Masalah yang masih banyak dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu kemiskinan. Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam pembangunan, hal ini tidak lagi hanya dilihat dari sisi ekonomi atau moneter saja, akan tetapi dilihat dari berbagai aspek terkait dengan kemiskinan tersebut. Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, maka upaya penaggulangannya membutuhkan berbagai langkah dan melibatkan banyak pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun masyarakatnya sendiri. Provinsi Sulawesi Utara juga tidak lepas dari masalah kemiskinan

terlebih khusus daerah penelitian yaitu Kota Manado yang merupakan Ibu Kota Sulawesi Utara. Berikut adalah jumlah penduduk miskin di kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Grafik 1.
Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2021-2022 (dlm Ribu Jiwa)



Sumber Data; BPS Provinsi Sulawesi Utara 2022

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan kemiskinan khususnya jumlah penduduk miskin di kabupaten kota di Sulawesi Utara tahun 2021 sampai 2022 dapat dilihat bahwa penduduk dengan tingkat kemiskinan terbanyak yaitu berada di Kota Manado dengan jumlah 25,55 ribu jiwa pada tahun 2020 kemudian meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,78 ribu jiwa.

Masalah yang banyak dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu kemiskinan. Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, maka upaya penanggulangannya membutuhkan berbagai langkah dan melibatkan banyak pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun masyarakatnya sendiri. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu ukurannya yaitu keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

Menurut penelitian Andika dan Hastarini (2011), kemiskinan merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan 3 masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat (Widjaja ; 2002).

Tujuan diberlakukannya sistem desentralisasi adalah untuk meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait dengan keuangan daerah Halim (2002:128) "kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Ada beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan kemandirian keuangan daerah dalam hal ini kebijakan fiskal yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Dengan adanya desentralisasi fiskal dengan besaran dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seharusnya diiringi dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. berikut data PAD, DAU, DAK dan DBH Kota Manado Tahun 2007 sampai 2021:

Tabel 1
Perkembangan Data PAD, DAU, DAK dan DBH Kota Manado
Tahun 2007-2021

Tahun	PAD	DAU	DAK	DBH
2007	54.715.561.525	374.754.000.000	30.898.500.000	37.397.000.788
2008	73.898.733.040	430.073.269.000	42.741.000.000	41.506.863.194
2009	72.404.996.767	420.752.563.000	55.682.000.000	44.264.400.585
2010	72.404.996.767	420.481.311.000	28.014.400.000	60.747.411.978
2011	134.721.720.942	482.198.138.000	42.958.200.000	49.347.807.983
2012	178.178.928.832	576.989.312.000	44.229.500.000	66.138.557.949
2013	215.871.042.643	647.565.931.000	51.989.870.000	57.487.390.973
2014	263.392.316.992	729.213.779.000	49.614.960.000	34.184.855.374
2015	289.462.741.463	750.810.852.000	147.113.780.000	29.042.967.533
2016	345.215.373.491	740.987.609.000	139.053.877.500	53.042.981.749
2017	374.608.722.678	727.970.839.000	258.838.544.606	44.828.519.612
2018	363.177.940.171	727.970.839.000	165.407.742.587	46.829.082.756
2019	377.379.618.671	788.240.853.000	157.460.345.260	35.451.884.742
2020	261.756.116.854	715.060.730.000	164.191.510.465	48.386.750.923
2021	292.635.793.644	702.045.434.844	151.097.913.816	66.826.261.925

Sumber data : Kota Manado Dalam Angka

Berdasarkan data yang ada pada table diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kota Manado cenderung meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2019 akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 261.756.116.854 juta rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 292.635.793.644 juta rupiah. Begitu juga dengan dana alokasi umum mengalami kenaikan DAK dari tahun 2007 sampai 2015 akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 740.987.609.000 juta rupiah dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2018 sebesar 727.970.839.000 juta rupiah pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 788.240.853.000 juta rupiah. Pada tahun 2021 DAU turun menjadi 702.045.434.844 juta rupiah.

Dana alokasi khusus berdasarkan data pada table diatas terus mengalami peningkatan DAK dari tahun 2007 sampai 2015 sebesar 147.113.780.000 juta rupiah akan tetapi tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 139.053.877.500 juta rupiah. Mengalami peningkatan tahun 2017 menjadi 258.838.544.606 juta rupiah. Tahun 2019 mengalami penurunan DAK menjadi 157.460.345.260 juta rupiah. Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 164.191.510.465 juta rupiah akan tetapi tahun 2021 turun menjadi 151.097.913.816 juta rupiah.

Dana bagi hasil juga setiap tahunnya mengalami fluktuasi atau mengalami kenaikan dan

penurunan setiap tahunnya. Dana bagi hasil mengalami kenaikan dari tahun 2007 sampai 2010 sebesar 60.747.411.978 rupiah, akan tetapi tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 49.347.807.983 rupiah. Meningkat pada tahun 2012 sebesar 66.138.557.949 rupiah mengalami penurunan sampai tahun 2015 sebesar 29.042.967.533 rupiah. Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 53.042.981.749 rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 66.826.261.925 rupiah.

Peran dana transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam hal pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah nyata dan bertanggungjawab, pemerintah daerah dituntut mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri dalam rangka membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan. Peningkatan jumlah dana transfer yang diterima Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah diantaranya berupa pengentasan kemiskinan melalui kebijakan alokasi belanja daerahnya. Juga Simanjuntak (2010) menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memang sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait judul **“ Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa wewenang Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017: 23).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disebut dengan APBN, dimana dana tersebut dialokasikan untuk pemerataan keuangan suatu daerah dengan mendanai kebutuhan daerah tersebut dalam upaya pelaksanaan desentralisasi seperti yang telah dijabarkan dalam PMK Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada APBN-P Tahun 2017. Dana alokasi umum erat kaitannya dengan belanja daerah terutama belanja daerah bidang pendidikan. Dana alokasi umum diperuntukkan untuk upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola dana yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat.

Dana Alokasi Khusus

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat. Dana ini memiliki tujuan yakni membantu suatu daerah untuk melakukan pendanaan akan sarana dan prasarana terhadap masyarakat daerah serta untuk mendanai pembangunan daerah agar tercapainya sasaran prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan khusus pada suatu daerah yang menjadi suatu urusan tersendiri bagi daerah tersebut dan dilakukan dengan prioritas nasional. Pembiayaan tersebut diantara lain adalah untuk sarana prasarana masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka akan mendorong cepatnya kemajuan pembangunan suatu daerah.

Dana Bagi Hasil

Dana ana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang. Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah berdasarkan prinsip by origin, dimana daerah penghasil mendapat lebih banyak dana. Hal tersebut terjadi karena pemerintah pusat lebih mengutamakan masyarakat setempat daerah penghasil sumber daya agar dapat memberikan manfaat bagi daerah tersebut (Putra, 2015).

Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Penelitian Terdahulu

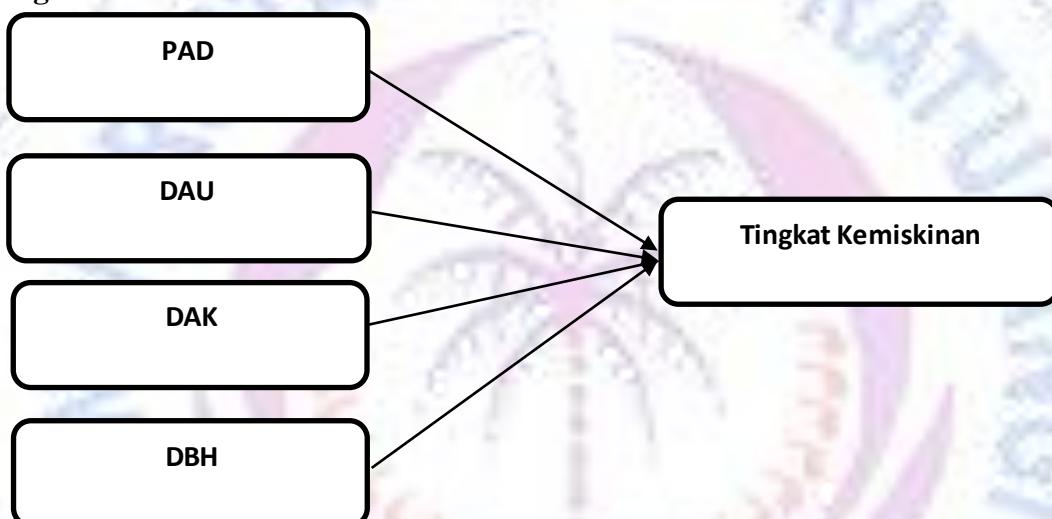
Penelitian Yang Dilakukan Oleh Fhilne Lisa Wowiling, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka (2021) Yang Berjudul Analisis Inovasi Peningkatan Pelayanan Samsat Sebagai Penunjang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Terhadap Penerimaan Bbn 1 Dan Pkb Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) dengan menggunakan analisis regresi real dan regresi dummy. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Inovasi memberikan peningkatan realisasi penerimaan yang cukup signifikan. (2) Pad mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Daerah Sulawesi Utara. Selalu memberikan inovasi pelayanan yang diinginkan masyarakat wajib pajak, sehingga tercipta kerja sama yang baik antara pemungut dan wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Penelitian Yang Dilakukan Oleh Joike Ishak Ondang , Vecky A.J. Masinambow , Daisy S.M. Engka (2021) Yang Berjudul Pengaruh Pendapatan Transfer Desa Dan Belanja Modal Terhadap Pdrb Serta Dampaknya Pada Angka Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. Dengan Menggunakan Analisis Regresi Berganda A. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan transfer desa berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pdrb sedangkan belanja modal berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap pdrb di kabupaten minahasa. secara keseluruhan atau simultan, pendapatan transfer desa dan belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai pdrb. hasil penelitian menunjukan

bahwa pendapatan transfer desa berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan sedangkan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan dan pdrb berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan di kabupaten minahasa. secara keseluruhan, ketiga variabel pendapatan transfer desa, belanja modal, dan pdrb mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rojers Gromiks Tangkulung, Vekie A. Rumate, Debby Ch. Rotinsulu (2020) yang berjudul Peran Budaya Mapalus Menunjang Program Rs Rtih Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. Analisis yang digunakan analisis kuantitatif. hasil penelitian menunjukkan secara kualitas budaya mapalus berperan dalam menunjang keberhasilan program Rs - Rtih Di Kabupaten Minahasa, kemudian secara kuantitatif dapat dibuktikan bahwa keberhasilan program Rs – Rtih mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa.

Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: Kajian Teori, 2022

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Hipotesis

- H1 : diduga pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
- H2 : diduga dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
- H3 : diduga dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
- H4 : diduga dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari data kuantitatif dengan metode sumber data adalah data sekunder: Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi yang menyangkut penelitian penulis yang di terbitkan oleh Instansi/lembaga/organisasi profesi dan lain-lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pusat Statistik Kota Manado.

Metode Analisis

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, uji hipotesis f dan t, koefisien korelasi dan koefisien determinasi.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis *Multiple Linear Regression*. Teknik analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis tabel dan analisis kuantitatif berupa metode regresi linear berganda dan juga uji asumsi klasik. Pengelolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Microsoft Excel 2013* dan *Eviews 8.0*.

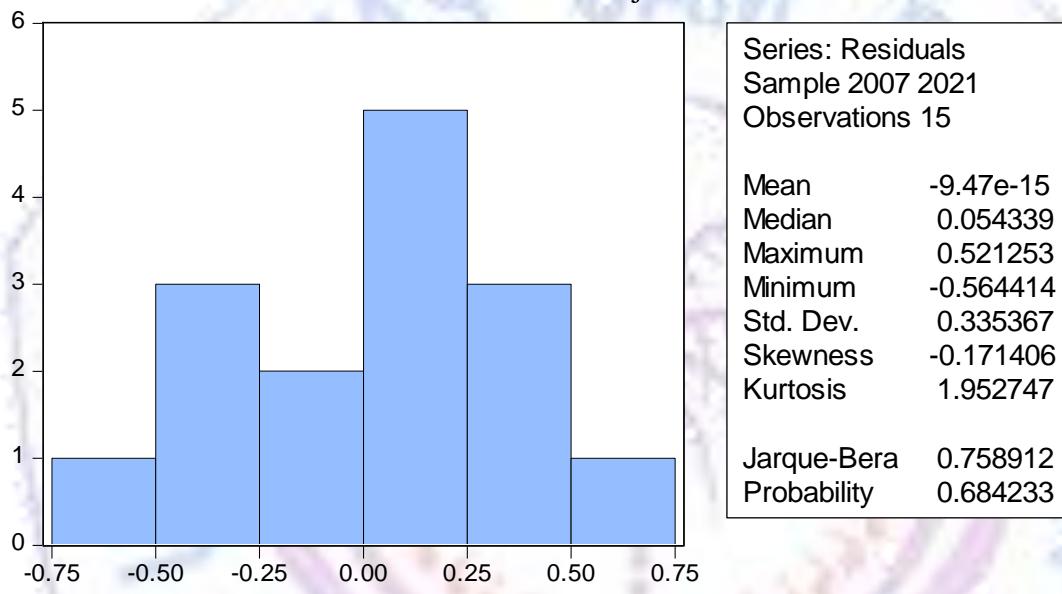
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Grafik 2. Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Eviews 8.0, 2022

Dari perhitungan Jarque-Bera di atas, nilai probabilitas yang di dapat lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau nilai probabilitas $0.68423 > 5\%$ artinya data dapat dikatakan berdistribusi normal

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	1.670725	Prob. F(4,10)	0.2324
Obs*R-squared	6.008758	Prob. Chi-Square(4)	0.1985
Scaled explained SS	3.152036	Prob. Chi-Square(4)	0.5327

Sumber: Hasil Olah Eviews 8.0, 2022

Dari perhitungan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dapat dilihat bahwa nilai probabilitas chi-square sebesar 0.1985 lebih besar dari $\alpha = 0.005$. Ho ditolak dan Ha diterima, artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.758492	Prob. F(2,8)	0.4993
Obs*R-squared	2.390963	Prob. Chi-Square(2)	0.3026

Sumber: Hasil Olah Eviews 8.0, 2022

Dari perhitungan uji autokorelasi dengan menggunakan uji LM test dapat dilihat bahwa nilai probabilitas chi-square sebesar 0.3026 lebih besar dari α 0.005 artinya tidak ada masalah autokorelasi.

Regresi Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda

Dependent Variable: Kemiskinan (Y) Method: Least Squares Sample: 2007 2021 Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD x_1	-4.933309	2.459093	-2.006150	0.0726
DAU x_2	7.270276	5.999764	1.211760	0.2535
DAK x_3	1.697642	0.631164	2.689698	0.0227
DBH x_4	0.978589	1.118636	0.874806	0.4022
C	-53.33011	51.92086	-1.027142	0.3286
R-squared	0.536691	Mean dependent var		5.631333
Adjusted R-squared	0.351367	S.D. dependent var		0.492702
S.E. of regression	0.396811	Akaike info criterion		1.250489
Sum squared resid	1.574590	Schwarz criterion		1.486505
Log likelihood	-4.378666	Hannan-Quinn criter.		1.247975
F-statistic	2.895964	Durbin-Watson stat		2.318253
Prob(F-statistic)	0.078634			

Sumber: Hasil Olah Eviews 8.0, 2022

Berikut hasil regresi untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) Dana Alokasi Khusus (X_3) Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (X_4) terhadap Kemiskinan (Y) menggunakan model OLS (*Ordinary Least Squares*).

$$\text{LogY} = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4X_4 + E_1$$

$$\text{LogY} = 53.33011 - 4.933309x_1 + 7.270276x_2 + 1.697642x_3 + 0.978589x_4 + 0,46$$

Uji Parsial (Uji T)

Hasil persamaan regresi Pendapatan Asli Daerah (X_1) pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel pendapatan asli daerah (X_1) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.0726. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari α 10%, maka Ha diterima Ho ditolak. Variabel pendapatan asli daerah (X_1) mempunyai nilai t hitung yakni 2.006150 dan t tabel 1.37218 dengan df 10 (n-k = 15-5= 10). Jadi, t hitung 2.006150 >t tabel 1.37218 Artinya ada hubungan linier antara pendapatan asli daerah dengan kemiskinan (Y). Jadi, dapat disimpulkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil persamaan regresi Dana Alokasi Umum (X_2) pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel dana alokasi umum (X_2) tedapat nilai probabilitas sebesar 0.2535. Nilai probabilitas ini lebih besar dari α 10%, maka Ha ditolak Ho di terima. Variable dana alokasi umum (X_2) mempunyai nilai t hitung yakni 1.211760 dan t tabel 1.37218 dengan df 10 (n-k = 15-5= 10). Jadi, t hitung 1.030599< t tabel 1.37218. Artinya tidak ada hubungan linier antara dana alokasi umum (X_2) dengan kemiskinan (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Hasil persamaan regresi Dana Alokasi Khusus (X_3) pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel dana alokasi khusus (X_3) terdapat nilai probabilitas sebesar 0.0227. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari α 5%, maka Ha diterima Ho ditolak. Variabel dana alokasi khusus (X_3) mempunyai nilai t hitung yakni 2.689698 dan t tabel 1.81246 dengan df 10 (n-k = 15-5= 10). Jadi, t hitung 2.689698 >t tabel 1.81246 Artinya ada hubungan linier antara dana alokasi khusus dengan kemiskinan (Y). Jadi, dapat disimpulkan dana alokasi khusus memiliki pengaruh signifikan

terhadap kemiskinan.

Hasil persamaan regresi Dana Bagi Hasil (X_4) pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel dana bagi hasil pajak & bukan pajak (X_4) tedapat nilai probabilitas sebesar 0.4022. Nilai probabilitas ini lebih besar dari $\alpha = 10\%$, maka H_a ditolak H_0 di terima. Variable dana bagi hasil (X_4) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 0.874806 dan t_{tabel} 1.81246 dengan df 10 ($n-k = 15-5 = 10$). Jadi, $t_{hitung} = 0.874806 < t_{tabel} = 1.81246$. Artinya tidak ada hubungan linier antara dana bagi hasil (X_4) dengan kemiskinan (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil (X_4) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil estimasi table 3 dapat dijelaskan Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) Dana Alokasi Khusus (X_3) Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (X_4) terhadap Kemiskinan (Y). Nilai F-statistik yang diperoleh 2.895964 sedangkan F-tabel 2.60. Nilai F table berdasarkan besarnya $\alpha = 10\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator ($k-1/5-1 = 4$) dan df untuk denominator ($n-k/15-4 = 10$). Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) Dana Alokasi Khusus (X_3) Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (X_4) secara simultan atau Bersama-sama berpengaruh Kemiskinan (Y).

Uji Determinasi R^2

Nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0.536. artinya, variasi perubahan Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) Dana Alokasi Khusus (X_3) Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak (X_4) mempengaruhi kemiskinan (Y) sebesar 53.6%, sedangkan sisanya (46.4%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan kemiskinan. Artinya apabila pendapatan asli daerah bertambah atau mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang atau turun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah. Rustiadi et. all (2010), dalam pendapatan asli daerah atau PAD yang meningkat belum menggambarkan pula kenaikan pendapatan masyarakat daerah itu sendiri. Akan tetapi, dengan meningkat nya PAD mampu menjadi kesempatan pemerintah daerah dalam menjadikan faktor sumber daya dalam peningkatan pendapatan masyarakat sehingga nantinya dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya pengaruh antara dana alokasi umum dengan kemiskinan. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari – hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk meningkatkan kemampuan suatu dearah dalam membiayai pembangunan. DAU bertujuan untuk pemerataan kamampuan kauangan antar daerah yang dimkasudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan anatar dearah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jadi Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber penerimaan yang penting bagi suatu dearah, adanya kontrol pemerintah dalam mengelola segala sumber penerimaan APBN termasuk DAU merupakan respon yang baik dalam mengelola keuangan derah sehingga potensi dearah akan terus berkembang. Keterkaitan Dana Alokasi Umum atau DAU dan Kemiskinan sebenarnya sama dengan keterkaitan Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan. Dimana DAU memberikan kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan sehingga DAU dapat membuat kapasitas keuangan masing-masing daerah yang sama melalui

implementasi kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan dan potensi daerah dan nantinya hal ini akan memicu pembangunan daerah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara dana alokasi khusus dengan kemiskinan. Artinya apabila dana alokasi khusus bertambah atau mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang atau turun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*. Menurut Halim (2014: 16) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi khusus digunakan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat Prioritas dasar pengalokasian Dana Alokasi Khusus, diberikan untuk Membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dana prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah. Sama halnya dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus juga memiliki keterkaitan dengan kemiskinan. Dimana DAK memberikan kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan sehingga DAK dapat membuat kapasitas keuangan masing-masing daerah yang sama melalui implementasi kebijakan dan potensi daerah dan nantinya hal ini akan memicu pembangunan daerah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan pengaruh antara dana bagi hasil dengan kemiskinan. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini berarti apabila dana bagi hasil meningkat, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila dana bagi hasil menurun maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami penurunan. Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan kemiskinan. Artinya apabila pendapatan asli daerah bertambah atau mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang atau turun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan pengaruh antara dana alokasi umum dengan kemiskinan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara dana alokasi khusus dengan kemiskinan. Artinya apabila dana alokasi khusus bertambah atau mengalami kenaikan maka kemiskinan akan berkurang atau turun begitu pula sebaliknya *ceteris paribus*.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan pengaruh antara dana bagi hasil dengan kemiskinan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk pemerintah daerah berdasarkan hasil alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Maka dari itu kedepannya pemerintah harus berupaya untuk bisa membuat kebijakan maupun program yang dapat menyentuh langsung kemasyarakatan dengan dana alokasi umum yang ada. Begitu juga dengan dana bagi hasil yang belum mampu mempengaruhi penurunan kemiskinan agar supaya harus lebih memperhatikan setiap penganggaran yang ada untuk berfokus kepada menurunan angka kemiskinan. Juga sebagai bahan referensi dalam menerima informasi untuk pembuatan kebijakan.
2. Untuk peneliti atau akademisi sebagai bahan informasi agar bisa mengembangkan penelitian dengan variabel-variabel yang lebih tepat untuk mengukur pengaruh terhadap kemiskinan.
3. Untuk masyarakat sebagai bahan referensi dan informasi terkait kemiskinan

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sri Wahyuni (2020)** Yang Berjudul Effect Of Original Revenue Income And Funds General Allocation Of Growth Economy Of Surakarta City.
- Ariyani Widyastuti dan Agung Nusantara (2022)** yang berjudul Does Fiscal Decentralization Affect Poverty? An Empirical Study. The Poverty percentage in Central Java ranked two throughout Java Island after DI Yogyakarta Province.
- Anti Nur Izzati dan Lucia Rita Indrawati (2021)** yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Magelang
- Alderon Edi Aidore , Vekie A. Rumate, Tri Oldy Rotinsulu (2020)** Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Produksi Sektor Perikanan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Absolut Di Kota Bitung.
- Deiby Natalia Rewah , Anderson G. Kumenaung , Debby Ch. Rotinsulu (2021)**. Analisis Dampak Pengembangan Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara.
- Dewi I,S Paulus, Rosalina A.M. Koleangan, Daisy S.M. Engka (2019)** Yang Berjudul Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung.
- Fhilne Lisa Wowiling, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka (2021)** Analisis Inovasi Peningkatan Pelayanan Samsat Sebagai Penunjang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Terhadap Penerimaan Bbn 1 Dan Pkb Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)
- F Setiawan1 and A F Aritenang (2019)** yang berjudul The impact of fiscal decentralization on economic performance in Indonesia
- Joike Ishak Ondang , Vecky A.J. Masinambow , Daisy S.M. Engka (2021)**. Pengaruh Pendapatan Transfer Desa Dan Belanja Modal Terhadap PDRB Serta Dampaknya Pada Angka Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa.
- Konny Joula Ellen Rasu, Anderson G. Kumenaung Dan Rosalina A.M. Koleangan (2019)** Yang Berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado
- Mohammad Azis (2016)** yang berjudul Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Malinau.
- Muhammad Abrara , Bambang Juandab , Muhammad Firdausc , Dedi Budiman Hakim (2020)** yang berjudul The Impact of Special Autonomy Funds on Poverty of Human Development and Unemployment in Aceh

Rojers Gromiks Tangkulung, Vekie A. Rumate, Debby Ch. Rotinsulu (2020). Peran Budaya Mapalus Menunjang Program Rs Rtlh Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa

Ratnajati Asnawi, Paulus Kindangen , Daisy S.M. Engka (2020), Pengaruh Pendidikan, Program Keluarga Harapan Dan Program Rumah Tinggal Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Suryani Yuli Astuti, Muhammad Ali Basyah dan Farokhah Muzayinatun Niswah (2021)
Yang berjudul The Effect Of PAD, DAU And DAK On Poverty Rates In Java.

